

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

*Analysis Of Revenue Of Land And Building Tax On Increasing Regional
Genuine Income In Enrekang Regency*

Ratnawati D

Email : ratnawati423@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Sumber daya alam berupa bumi dan bangunan merupakan potensi yang keberadaannya yang harus dijaga dan dilestarikan guna menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Enrekang. Penggunaan pajak bumi dan bangunan tanpa kompensasi langsung dapat diberlakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai operasi dalam hal penyelenggaraan pemerintah di provinsi Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) walaupun pencapaian targetnya hanya dapat terealisasi tepatnya ditahun ke lima terakhir. Dan beberapa tahun lainnya targetnya jauh dari realisasi yang ada karena adanya beberapa faktor yang terjadi, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Analisis, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Natural resources in the form of land and buildings are potentials whose existence must be maintained and preserved in order to support and increase Enrekang Regional Original Income. The use of land and building tax without direct compensation can be enforced based on applicable laws and regulations and used to fund operations in terms of government administration in the province of Enrekang. This research was carried out with the aim of knowing the Analysis of Land and Building Tax (PBB) Revenue on the Increase of Regional Original Income of Enrekang Regency. The type of this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation.

The results of the study show that Land and Building Tax Receipts towards the increase in Regional Original Income of Enrekang Regency have increased and decreased (fluctuated) even though the achievement of the target can only be realized precisely in the last fifth year. And in several other years, the target was far from being realized due to several factors that occurred, both internal factors and external factors that affected Regional Original

Income.

Keywords: Analysis, Land and Building Tax, Locally-generated revenue

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. PBB kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Dalam undang-undang tersebut yang dimaksudkan dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan disebut juga sebagai pajak langsung, sehingga proses penagihannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutang pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan yang menentukan terutang pajak atau tidak. Dalam hal penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB itu sendiri yang menjadi sumber utama APBD penerimaan PBB tersebut sehingga di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari hasil pajak (Oktafitriani, 2016).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas di daerah manapun untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Aly & Mamnun, 2017). Namun, kenyataannya Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya, untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sebagai sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD belum sepenuhnya mampu membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah masih merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Syahrial & Toyo, 2014). Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah serta pajak daerah yang salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (ekselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya alam di negara atau suatu daerah yang ada.

Sumber daya alam berupa bumi dan bangunan merupakan potensi yang keberadaannya yang harus dijaga dan dilestarikan guna menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Enrekang. Penggunaan pajak bumi dan bangunan tanpa

kompensasi langsung dapat diberlakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai operasi dalam hal penyelenggaraan pemerintah di provinsi Enrekang. Hal tersebut terlihat secara nyata pada ketergantungan Daerah pada subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah.

Ketergantungan Pemerintah daerah pada subsidi dari Pemerintah Pusat masih sangat besar. Bahkan pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah belum bisa membiayai segala belanja Rutin atau Belanja Pembangunan, hal ini dikemukakan oleh Morfid (2001: 77) Mengidentifikasi bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 29% saja dan selebihnya berasal dari subsidi atau bantuan Pemerintah dalam berbagai bentuk. Besarnya bantuan tersebut yang mengakibatkan banyaknya pengurangan Perintah serta target dan rencana dari Pusat yang dibebankan pada Pemerintah Daerah (Rahmadani, 2015).

Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang berkewajiban mengupayakan semaksimal mungkin penerimaan pendapatan asli daerah tersebut melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam mengolah sumber daya alam yang ada di Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai banyak potensi daerah yang dapat digali dari serta potensi daerah yang dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga pihak pemerintah daerah Kabupaten Enrekang berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang dengan cara menggali beberapa sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Proses penelitian ini berlangsung tiga bulan mulai dari akhir bulan Juni hingga akhir bulan September tahun 2022 dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Enrekang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.1 Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data secara mendalam tentang aspek tertentu yang berkenaan dengan tujuan pada penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah kepala cabang, staff beserta jajarannya. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang akan mengadakan mengamatan langsung ditempat lokasi penelitian.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan melihat dokumen berupa pencatatan yang ada dilokasi penelitian.
3. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deksriptif. Dimana yang dimaksud teknik analisis kualitatif deksriptif adalah menggambarkan tentang

bagaimana Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2022 Kabupaten Enrekang

No	Tahun	Target (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Tahun 2018	2,900,000,000	2,955,847,827
2	Tahun 2019	3,215,380,160	2,695,557,831
3	Tahun 2020	4,230,000,000	4,067,882,946
4	Tahun 2021	4,230,000,000	3,647,405,563
5	Tahun 2022	4,230,000,000	4,591,922,048

Sumber : badan pendapatan daerah

Berdasarkan tabel 1 mengenai besarnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Enrekang yang datanya diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Dengan demikian, dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah penerimaan realisasi pada Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuatif) selama 5 tahun terakhir dengan pencapaian targetnya hampir tidak mencapai target setiap tahun yang ada.

Pengukuran efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berguna untuk menggambarkan kemampuan dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan target yang direncanakan. Kemampuan dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugasnya dikategorikan sudah cukup baik (cukup efektif). Apabila pencapaian efektifitas yang dicapai minimal 100%, semakin tinggi tingkat efektifitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampuan dinas Badan Pendapatan Daerah dalam pencapaian targetnya sudah semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa perolehan efektifitas rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dicapai sebesar 95.33% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan cukup efektif. Walaupun beberapa pencapaian targetnya hampir tidak mencapai target. Hal tersebut terjadi, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu faktor internal (pemerintah) maupun faktor eksternal (masyarakat) yaitu sebagai berikut:

- a. Penagihan pajak kurang efektif kepada wajib pajak baik secara perorangan atau individu
- b. Adanya wajib pajak yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Enrekang sehingga aparat dari phak pemerintah sulit dalam menyampaikan surat penagihan pajak terutang PBB.
- c. Kurangnya pendataan data oleh aparat tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
- d. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dimana pihak pemerintah hanya melakukan sekali setahun
- e. Kurang sadarnya masyarakat akan hal wajib membayar pajak Bumi dan Bangunan.

- f. Adanya faktor ekonomi, dimana wajib pajak hanya mementingkan kebutuhan sehari-harinya.
- g. Terjadinya kemalasan masyarakat akan membayar pajak sehingga mereka menunda untuk membayar pajak yang berkepanjangan disebabkan kesibukan sendiri.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022 Kabupaten Enrekang

No	Tahun	Target (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Tahun 2018	129,615,126,867	66,043,333,304.23
2	Tahun 2019	134,973,760,140	73,239,444,538.35
3	Tahun 2020	118,959,749,845	80,164,619,187.96
4	Tahun 2021	178,867,670,848	73,308,654,593.08
5	Tahun 2022	95,991,971,090	103,457,892,545.73

Sumber : badan pendapatan daerah

Dengan demikian, dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah penerimaan realisasi pada Pendapatan Daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuatif) selama 5 tahun terakhir. Walaupun pencapaian target hanya dapat terealisasi selama 1 tahun tepatnya ditahun 2022. Dan untuk beberapa tahun sebelumnya tepatnya ditahun 2018 sampai dengan tahun 2021 realisasi yang diperoleh mengalami peningkatan tetapi pencapaian targetnya tidak pernah mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor terjadinya target jauh dari realisasi yang ada. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Item lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu penjualan barang milik daerah berupa asset bangunan dan asset yang bergerak tidak terealisasi sesuai target yang direncanakan
- b. Pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagi hasil dari beberapa pihak seperti dari pihak Bank Sulselbar tidak tercapai sesuai target yang direncanakan.
- c. Item pada reterbusi daerah juga tidak tercapai sesuai target yang direncanakan

Lepas dari itu semua akan ada kemungkinan terjadi penyebab-penyebab tidak berjalannya ataupun tidak terealisasinya hal tersebut dikarena dalam penentuan keberhasilan dari tercapainya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak jauh dari faktor internal maupun eksternal. Pengukuran efektifitas pendapatan Asli daerah tidak beda jauh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana hal tersebut berguna untuk menggambarkan kemampuan dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan target yang direncanakan. Kemampuan dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugasnya dikategorikan apakah sudah baik (efektif) ataupun kurang baik (kurang efektif).

Dapat dilihat bahwa perolehan efektifitas rata-rata pendapatan asli daerah yang dicapai sebesar 57% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang baik (kurang efektif).

Dengan demikian, dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besarnya jumlah kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuatif) selama 5 tahun terakhir. Dimana menunjukkan bahwa Pajak Bumi

dan Bangunan memberikan peran dengan kontribusi yang ada, walaupun besaran kontribusinya bernilai kecil atau sangat rendah. Perolehan kontribusi yang sangat rendah tersebut diharapkan dinas pendapatan daerah dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pencapaian terendah tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil wawancara di Badan Pendapatan Daerah dengan berbagai narasumber yaitu adanya faktor dan masalah yang menyebabkan rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir tersebut dikarekan beberapa hal berikut ini:

- a. Kurangnya kesadaran warga Kabupaten Enrekang dalam memperhatikan wajib membayar pajak.
- b. Adanya faktor ekonomi, dimana wajib pajak hanya mementingkan kebutuhan sehari-harinya.
- c. Terjadinya kemalasan masyarakat akan membayar pajak sehingga mereka menunda untuk membayar pajak yang berkepanjangan disebabkan kesibukan sendiri.
- d. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban bayar Pajak

PEMBAHASAN

Berdasarkan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang yang telah disajikan pada hasil penelitian maka berikut peneliti sajikan pembahasan dari analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan pencapaian target dan realisasi yang berbeda. Dimana targetnya hanya dapat terealisasi tepatnya ditahun ke lima terakhir yaitu ditahun 2022. Dan beberapa tahun lainnya tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 targetnya tidak dapat terealisasi dengan baik karena adanya beberapa faktor yang terjadi, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menurut Dian ekawati Tahun 2013 “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pinrang”. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami naik turun pada 2009 sampai 2012. Adapun realisasi pendapatan daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2012 terus mengalami peningkatan. Adapun kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan daerah mengalami penurunan persentase kontribusi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menurut Fika Utari Tahun 2018 dalam judul penelitiannya “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada dinas pendapatan kota medan penerimaan pajak bumi bangunan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015- 2017. Realisasi penerimaan PBB hanya memiliki rata-rata efektivitas sebesar 84,37%.Penerimaan PBB juga memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan penerimaan PBB kota medan memiliki rata-rata kontribusi dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 29,57% dan memiliki kriteria sedang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab realisasi tidak mencapai target adalah seperti mekanisme penyampaian SPPT yang kurang baik, adanya faktor ekonomi yang menyebabkan susah masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menurut Marjuni Marjuni, Muhlis Madani, Samsir Tahun 2019 dalam judul penelitiannya "Efektifitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan yang baik tetapi masih ada hambatan yang sering terjadi seperti hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga memperlambat dalam sistem pengelolaan PBB. Hambatan internal yaitu masih kurangnya sumber daya manusia para pegawainya, Surat Pemberitahuan Pajak Tertulis (SPPT) kadang tidak sampai ke wajib pajak atau masyarakat karena lokasi tempat tinggal wajib pajak yang susah untuk di jangkau.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengenai analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuatif), faktor penyebabnya adalah faktor internal dan faktor eksternal sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti sajikan dapat dibuat kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif) walaupun pencapaian targetnya hanya dapat terealisasi tepatnya ditahun ke lima terakhir. Dan beberapa tahun lainnya targetnya jauh dari realisasi yang ada karena terjadinya beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal sehingga mempengaruhi pada Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada pihak Badan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

Bagi Instansi Badan Pendapatan Daerah harus terus meningkatkan kinerjanya, misalnya pendataan ulang tentang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar potensi-potensi baru atas Pajak Bumi dan Bangunan dapat terdata dengan baik, Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, Meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, harus dapat lebih memperluas lagi ruang lingkup penelitiannya baik mengenai pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maupun mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu ataupun periode pelaporan yang akan diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal*

Akuntansi Unesa, 1(2), 1–19.

Aly, A. D., & Mamnun, A. G. (2017). Pajak Reklame Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 51–59.

Damayanti, A. S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung*.

Fika Utari (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Fakhrzy, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pajak Restoran Dalam Transaksi Jual Beli Makanan. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 143–165.

Fery, I. (2021). Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(1), 72–83.

Finica, F. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2017/Finica/38150246/Pembimbing: Prima Apriwenni*.

Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103.

Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).

Mariana, L. (2019). MEKANISME PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2).

Marjuni, M., Madani, M., & Rahim, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 192–208.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45.

Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Brawijaya University.

- Oktafitriani, M. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pramono, D. S., & Rahardjo, S. T. (2016). *Mekanisme Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pendapatan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (Up3ad) Kabupaten Semarang*. Sekolah Vokasi.
- Priandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13–25.
- Rahmadani, A. (2015). *Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Galian Golongan C Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Nagan Raya*. UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sudira, I. M. (2022). Penerapan Nilai Objek Pajak (Njop) Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Pbhtb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Yusthima*, 2(1), 59–70.
- Syahrial, M., & Toyo, S. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), 103630.
- Utirahman, N. R. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Wahyuningtyas, D. G., & Muid, D. (2017). *Prosedur Penggunaan E-Faktur Dalam Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt New Ratna Motor Semarang*. Sekolah Vokasi.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*.
- Wiratno, F. I. B. (N.D.). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan PBB P2 Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang*.
- Wowor, V. M. L., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Motoling Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).